



**USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

***SOCIAL ENTREPRENEURSHIP* BERBASIS PANCASILA SEBAGAI  
SALAH SATU UPAYA PENANGANAN PENGANGURAN DAN  
PEMERATAAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

**BIDANG KEGIATAN  
PKM-GT**

**Diusulkan oleh:**

**Stevi Pebriani (H44080002 / Angkatan 2008)**

**Alvino Maryandani (H34080087 / Angkatan 2008)**

**Adinda Firantika P. (H44090099 / Angkatan 2009)**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BOGOR**

**2011**

**LEMBAR PENGESAHAN USULAN  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA GAGASAN TERTULIS**

1. Judul Kegiatan : *Social Entrepreneur* Berbasis Pancasila Sebagai Upaya Penanganan Pengganguran dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia
2. Bidang Kegiatan : ( ) PKM-AI ( x ) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama : Stevi Pebriani
  - b. NIM : H44080002
  - c. Fakultas : Ekonomi dan Manajemen
  - d. Program Studi/ Jurusan : S1/ Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
  - d. Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor

Menyetujui,  
Ketua Departemen Ekonomi Sumberdaya  
dan Lingkungan

(Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT)  
NIP.19660717 199203 1 003

Mengetahui,  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS)  
NIP 19581228 198503 1 003

Bogor, 27 Februari 2011  
Ketua Pelaksana Kegiatan,

(Stevi Pebriani)  
NIM. H44 080 002

Dosen Pendamping

(Rizal Bachtiar, S.Pi.M.Si)  
NIP 19800603 200912 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, tuntunan, dan perlindungan-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) berupa ide dan gagasan kami dalam menemukan alternatif berbagai solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Melalui PKM-GT inilah, kami menuangkan potensi kami selaku mahasiswa dalam menanggapi secara cerdas permasalahan sosial yang pada saat ini sedang terjadi. Bidang kewirausahaan dan nilai-nilai pancasila menjadi bidang yang menarik perhatian kami untuk dijadikan acuan dalam penulisan karya tulis ini. Dalam hal ini, kami menyepakati bahwa pemerataan kesejahteraan dan kembali ke nilai-nilai pancasila merupakan sektor yang penting dalam pembangunan bangsa dan sumberdaya manusia. Untuk itu, kami ingin mengkaji secara lebih dalam mengenai permasalahan sumberdaya manusia yaitu menurunnya minat generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila dan membantu mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan yang masih banyak terjadi di Indonesia melalui kegiatan *sosial entrepreneurship*. Melalui tulisan ini kami ingin mengembangkan pemikiran dan gagasan kritis untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut dalam rangka tanggung jawab dan pengabdian kami sebagai generasi muda untuk membantu pencapaian mengurangi angka pengangguran yang pada akhirnya dapat mencapai pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi kepada kami dalam menyelesaikan karya tulis ini. Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Namun, kami berharap agar berbagai solusi positif dari hasil penulisan gagasan tertulis ini dapat merupakan sumbangsih yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder dan negara ini.

Bogor, 27 Februari 2011

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v

### PENDAHULUAN

Latar Belakang .....	1
Tujuan Penulisan .....	2
Manfaat .....	2

### GAGASAN

Kondisi Kekinian .....	3
Analisis Hubungan antara Pengangguran dengan Kewirausahaan .....	4
Dampak Pengembangan Kewirausahaan dalam Pemerataan Pendapatan.....	4
Solusi yang Pernah Ditawarkan Sebelumnya.....	4
Gagasan yang Diberikan Sebagai Solusi Alternatif .....	5
Pihak yang Terkait dalam Merealisasikan Gagasan.....	8
Langkah Strategis yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Gagasan.....	9

### KESIMPULAN

Kesimpulan .....	12
------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	12
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	13
-----------------------	----

### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Nilai-nilai yang Mencerminkan Kemajuan dan Keterbelakangan Suatu Individu, Komunitas Kecil, dan Komunitas Besar Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila.....	5
Tabel2. Hubungan antara Nilai-nilai Dasar dan Komponen (Nilai Komposit) Kemajuan Penduduk menurut Tingkat Kekuatannya .....	6

### DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup .....	13
----------------------------	----

## RINGKASAN

Stevi Pebriani *et al.* *Social Entrepreneur* Berbasis Pancasila Sebagai Upaya  
Penanganan Pengangguran dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia

Dibawah bimbingan: Rizal Bachtiar, S.Pi, M.Si

Pemerataan pendapatan merupakan manifestasi dari konsep dasar negara yang termaktub dalam pancasila pada sila kelima yaitu keadilan sosial. Hal ini merupakan *platform* dari pembangunan Indonesia agar tercipta kesejahteraan sosial. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk mengenalkan konsep *Social Entrepreneur (sociopreneur)* sebagai alternatif kewirausahaan dan menganalisis konsep *sociopreneur* dalam usaha pemerataan pendapatan, khususnya di Indonesia.

*Sociopreneur* berbasis pancasila diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan usaha baru atau kerap dikatakan adalah melahirkan wirausahawan guna menekan angka pengangguran di negeri ini. Kewirausahaan sebagai representasi kemandirian masyarakat menopang ekonomi kerakyatan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini.

Adapun konsep ini, sejatinya sejalan dengan konsep dasar kewirausahaan sosial yang bergerak ke arah pembangunan sistem dan individu yang mandiri, kreatif, dan berbudaya pancasila. Konsep ini penting diterapkan di Indonesia untuk menekan kesenjangan sosial yang semakin kencang terjadi.

Solusi yang ditawarkan dalam *sociopreneur* adalah kembali pada nilai-nilai dasar pancasila yang sarat dengan nilai sosial pembangunan yang analog dengan konsep dasar kewirausahaan sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai pancasila saat ini sudah mulai ditinggalkan seiring masuknya budaya globalisasi yang ada.

Kata Kunci : pengangguran, pemerataan, *social entrepreneurship*, pancasila

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia, namun kurang dalam pendekatan kualitas dibandingkan dengan negara-negara lain. Indikator lurus ke depan digunakan untuk menemukan kualitas ini adalah angka kemiskinan absolut dan kelemahan modal masyarakat sosial-budaya. Penduduk kualitas harus dilihat secara komprehensif yang meliputi jumlah fisik, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Pendekatan ini harus juga diterapkan untuk merumuskan perencanaan pembangunan untuk kualitas penduduk, khususnya pertimbangan tentang nilai-nilai sosial-budaya yang melekat di masyarakat. Dimensi nilai sosial budaya akan sangat menentukan kemajuan pembangunan dan tingkat kemajuan masyarakat baik dalam komunitas kecil atau besar. Unsur nilai lebih lengkap dan kuat, khusus untuk komponen nilai komposit, akan menentukan tingkat kualitas masyarakat, terutama ketika seseorang melihat diri-dukungan, keadilan, solidaritas, dan dimensi keberlanjutan dan generasi oleh generasi.

Pengangguran, dan kemiskinan merupakan fenomena klasik permasalahan sosial di Indonesia. Banyaknya angka pengangguran yang dipasok dari lulusan perguruan tinggi. Ini mengindikasikan adanya anomali dari stigma-stigma yang beredar di masyarakat bahwa lulusan perguruan tinggi akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

Menurut data BPS (2007) dari data departemen pendidikan mencatat jumlah lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia mencapai 323.902 orang pada periode tahun 2005-2006. Data survei angkatan kerja nasional mengemukakan bahwa, angka pengangguran per february 2007 menurun dari 10,28% di tahun 2008 menjadi 9,75%. dari segi angka pengangguran terdidik yang naik dari 6,16% menjadi 7,02 % Fakta empiris yang terhampar adalah semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi di Indonesia tapi tidak diimbangi oleh daya serap lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran semakin banyak.

Hal ini menimbulkan *multiplier effect* karena dari masalah tersebut akan melahirkan masalah-masalah sosial yang baru di masyarakat, seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya pemerataan pendapatan. sehingga, perlu upaya dan kerja keras dari semua pihak untuk mengatasinya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran adalah dengan menciptakan usaha baru atau kerap dikatakan adalah melahirkan wirausahawan guna menekan angka pengangguran di negeri ini. Kewirausahaan sebagai representasi kemandirian masyarakat menopang ekonomi kerakyatan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini. Ini terbukti dari fakta resistennya Indonesia pada tahun 2008 saat dunia mengalami kegoncangan akibat krisis finansial *subprime mortgage* di Amerika Serikat.

Dewasa ini, resistennya Indonesia belum diikuti oleh pemerataan yang signifikan dalam masyarakat. Disparitas ekonomi yang semakin terasa di masyarakat. Adanya konsep kewirausahaan sebagai *platform* pembangunan bangsa yang sudah marak digalakkan di Indonesia belum dapat menjawab polemik terkait pendistribusian pendapatan tersebut. Fenomena kewirausahaan yang terdistribusi secara luas di masyarakat, khususnya di Indonesia pada dasarnya masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendapatan di masyarakat, maka dibutuhkan konsep yang lebih bisa mengatasi hal mendasar layaknya pendistribusian pendapatan atau pemerataan pendapatan.

## **Tujuan**

Tujuan dari gagasan ini adalah untuk mengenalkan konsep *sociopreneur* berlandaskan Pancasila sebagai alternatif kewirausahaan dan menganalisis konsep *sociopreneur* berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam usaha penanganan pengangguran dan pemerataan pendapatan, khususnya di Indonesia.

## **Manfaat**

Hasil gagasan ini merupakan hasil analisis problematika yang didapatkan dari kondisi sosial terutama kemiskinan yang terjadi di Indonesia akibat dari rendahnya distribusi pendapatan antara *high income* ke *low income*.

Oleh karena itu, hasil penulisan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya bagi *stakeholder* yang terkait langsung, maupun penulis selanjutnya untuk dijadikan bahan perbandingan. Sementara hasil analisis dampak diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi para entitas pengambil keputusan dalam hal ini, wirausaha dalam merancang konsep kewirausahaan yang berbasis masyarakat (*adaptive, collaborative, and management*) dan realisasinya secara nyata dalam bidang usahanya masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan instrumen-instrumen kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk memfasilitasi, mendampingi, dan melegitimasi konsep wirausaha berbasis masyarakat.

## GAGASAN

### **Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan**

Dewasa ini, banyak asumsi yang menilai indikator ekonomi suatu negara, mulai dari segi laju pertumbuhan ekonomi hingga dari segi pemerataan pendapatan. Adapun fokus pada masalah tersebut adalah terkait pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan identik dengan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, dimana semakin pemerataan pendapatan rendah maka tingkat kesenjangan ekonomi semakin tinggi. Kesenjangan sosial ini digambarkan bahwa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin sehingga terjadi jurang sosial antara mereka. Hal ini dikarenakan kepemilikan sumberdaya yang terlalu bebas dari para orang kaya atau pemilik modal.

Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran tersebut ditemukan di beberapa negara.

## **Analisis Hubungan Antara Tingginya Tingkat Pengangguran dan Terbukanya Kesempatan Untuk Berwirausaha (*Enterpreneurship*)**

Pengangguran merupakan eksese dari fenomena terbatasnya kesempatan kerja yang berbanding terbalik dengan sumberdaya manusia yang ada. Selain itu, keterbatasan sumberdaya alam yang akan diproduksi juga mempengaruhi hal adanya pengangguran. Pada saat itulah, peluang untuk berwirausaha bagi setiap individu lahir, pada dasarnya kemajuan suatu negara terletak seberapa besar negara dapat mendukung kemandirian dari masyarakat atau dalam kata lain seberapa besar negara berpihak kepada kewirausahaan.

## **Dampak Pengembangan Kewirausahaan terhadap Pemerataan Pendapatan di Indonesia**

Populasi enterpreneur di Indonesia masih kurang dari satu persen total populasi penduduk. Ini menunjukkan bahwa profesi enterpreneur masih merupakan profesi yang memiliki peluang yang besar untuk terus dikembangkan di Indonesia. Pada intinya, terdapat tiga faktor yang menyebabkan penurunan kemiskinan, antara lain: pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penciptaan wirausahawan baru, dan kebijakan pengurangan kemiskinan dari pemerintah. ([www.koranjakarta.com](http://www.koranjakarta.com)). Faktor-faktor tersebut secara sah telah diterapkan di negara-negara maju seperti Jerman, dimana perkembangan kewirausahaan yang ditransformasikan melalui laju bisnis kecil menengah yang kuat dan beromzet besar.

## **Solusi yang Pernah Ditawarkan Sebelumnya**

Program pemerataan yang pernah dilakukan pemerintah antara lain: BLT, pemberian RASKIN, dan PNPM mandiri. Ketiga program tersebut direalisasikan pada medio tahun 2004 hingga tahun 2010. Untuk BLT, skema yang dilakukan seperti memberikan uang sejumlah Rp.300.000 per tiga bulannya sebagai kebijakan imbalan yang lahir dari kebijakan naiknya harga BBM medio tahun 2004 hingga tahun 2009. BLT merupakan produk pemerintah yang gagal menurut kalangan akademisi dan negarawan, karena secara tidak langsung seperti

mengajari masyarakat akan pemerataan yang instan. Hal tersebut hanya memberikan harapan semu untuk rakyat dan malah memberikan masalah baru yaitu memupuk rasa malas bekerja kepada masyarakat.

### **Gagasan yang Diberikan Sebagai Solusi Alternatif**

Kewirausahaan sosial (*sosial entrepreneurship*) berlandaskan Pancasila sebagai solusi untuk membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia merupakan gagasan dasar dari penulisan ini. Adapun hakikat dari kewirausahaan sosial berbasis Pancasila ini adalah konsep kemandirian, kreatifitas, dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan yang berlandaskan atas nilai-nilai dasar perjuangan Indonesia, yaitu Pancasila.

Nilai-nilai dasar Pancasila yang sarat dengan nilai sosial pembangunan yang analog dengan konsep dasar kewirausahaan sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila saat ini sudah mulai ditinggalkan seiring masuknya budaya globalisasi yang ada. Menurut Mubyarto (1987), ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi atau sistem perekonomian tetapi berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional.

Ada lima ciri khas ekonomi Pancasila sebagaimana bisa diserap dari UUD 45 pasal 33, bahkan dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri. Pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian. Kedua, perekonomian digerakan oleh rangsangan rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral. Di dalam ekonomi kapitalistik, roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi: sedang dalam ekonomi Pancasila, roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral.

Masalah ekonomi menyangkut masalah materi, namun hal itu tidaklah berarti bahwa materi itu tidak ada hubungannya dengan moral dan sosial. Kalau kita juga memperhatikan masalah moral dan sosial. Kalaupun kita juga

memperhatikan masalah moral dan sosial di samping ekonomi, maka hal itu berarti kebijaksanaan dan tindakan ekonomi kita akan lain, dibandingkan apabila yang kita kejar hanyalah rangsangan ekonomi saja. Dalam sektor moderen diketahui suatu perusahaan harus memperoleh keuntungan, dan pengerjaan keuntungan merupakan satu-satunya ukuran.

Ketiga, berhubungan dengan sila pertama ketuhanan yang maha esa, adalah kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial, egalitarisme. Sehingga ada rasa solidaritas sosial yang menjiwai para wirausahawan, dan solidaritas sosial.

Keempat, ada kaitannya dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. Kelima, dalam sistem perekonomian pancasila, harus tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Konsep pasar bebas dan kepemilikan modal yang sebesar-besarnya oleh para pemilik modal membuat sebuah fenomena sosial di negara ini yaitu rendahnya pemerataan pendapatan. Maka dari itu, konsep kewirausahaan sosial berbasis pancasila dibangun guna menciptakan kembali atmosfer dari nilai luhur pancasila yang disandingkan dengan kemandirian, kreatifitas, dan inovasi dalam hal melakukan kegiatan produktif. Adapun mewujudkan gagasan tersebut yaitu dengan mengarahkan individu atau kelompok ke arah indikator kewirausahaan sosial berbasis pancasila. Di bawah ini merupakan perbandingan nilai-nilai kemajuan dari individu, komunitas kecil, dan komunitas besar, yang terdapat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Perbandingan Nilai-nilai yang Mencerminkan Kemajuan dan Keterbelakangan Suatu Individu, Komunitas Kecil dan Komunitas Besar Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Kemajuan	Tingkat Pelaku Sosial			Nilai-nilai Kemunduran
	Individu/ Keluarga	Komunitas Kecil (Desa)	Komunitas Besar (Negara)	
Rasa malu & harga diri				<i>Rai gedheg</i> & rendah diri
Kerja keras Rajin & disiplin				Kerja lembek Malas & seenaknya
Hidup hemat &				Boros &

produktif		konsumtif
Menyenangi inovasi		Resisten inovasi
Menghargai prestasi		Askriptif/primo rdial
Sistematik & terorganisir		Acak & difuse
Empati tinggi		Antipati tinggi
Rasional/impersonal		Emosional/pers onal
Sabar dan syukur		Pemarah & penuntut
Amanah ( <i>high trust</i> )		Tidak bisa dipercaya
Visi jangka panjang		Visi jangka pendek

Dijelaskan dalam tabel tersebut bahwa nilai-nilai dasar kearifan lokal atau budaya luhur bangsa ini sudah ada dalam dasar negara kita yaitu pancasila yang berguna sebagai pedoman bagi kemajuan bangsa ini. Kemudian, untuk menyempurnakan konsep nilai-nilai luhur tersebut agar semakin bisa diterima oleh masyarakat adalah menyatukannya dengan konsep dasar kewirausahaan yaitu (1) Kemauan kuat untuk berkarya mandiri; (2) Kemampuan untuk mengambil risiko; (3) Kemauan untuk bekerja teliti, tekun, dan produktif; (4) Berkarya dengan semangat dan beretika (Kasmir, 2006). Kemudian, terdapat konsep kelembagaan sebagai *platform* gerakan sosial yang termasuk dalam konsep kewirausahaan sosial yaitu adaptif, kolaboratif, dan manajemen. Terdapat integrasi dari nilai-nilai luhur pancasila, konsep kewirausahaan, dan konsep kelembagaan sosial yang tercantum pada indikator yang mencerminkan konsep kewirausahaan sosial berbasis pancasila, yang terdapat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hubungan antara Nilai-nilai Dasar dan Komponen (Nilai Komposit) Kemajuan Penduduk menurut Tingkat Kekuatannya

Nilai-nilai Dasar	Komponen Kualitas Kemajuan Penduduk			
	Produktivitas	Keadilan / kemanusiaan	Solidaritas/ gotong-royong	Keberlanjutan/ generasional
Rasa malu & harga diri	+++	+++	+++	+++
Kerja keras	+++	+++	+++	+++
Rajin & disiplin	+++	+++	+++	+++
Hidup hemat	+++	+++	+++	+++
Gandrung inovasi	+++	++	+++	+++
Menghargai prestasi	+++	++	++	++
Berpikir sistematis	+++	++	+	+++
Empati tinggi	++	++	+++	+++
Rasional/impersonal	+++	+++	+++	+++
Sabar dan syukur	++	+++	++	+++

Amanah ( <i>high trust</i> )	+	++	+++	+++
Visi jangka panjang	+	++	+++	+++
Adaptif	+++	+++	+++	+++
Kolaboratif	+++	+++	+++	+++
Manajemen	+++	+++	+++	+++
Mandiri	+++	+++	+++	+++

Sumber : Prandji. 2011. Revitalisasi Penguatan Hubungan antara Elemen Tata Nilai Dasar dan Komponen Kemajuan Masyarakat. Diolah Kembali Oleh Maryandani.

Keterangan : (1) +++ = keterkaitan sangat kuat  
 ++ = keterkaitan sedang  
 + = keterkaitan kecil  
 (2) Pemuatan tanda (+) dalam tabel bersifat hipotetik dan masih perlu dikaji secara lebih kritis dan diuji secara empirik.

Pemahaman yang tergambar pada tabel 2 adalah indikator ideal dari individu yang menerapkan nilai-nilai pancasila, konsep kewirausahaan, dan konsep kelembagaan sosial yang dari kombinasi tersebut melahirkan sosok wirausaha sosial yang dapat melakukan aktifitas kewirausahaan sosial guna mewujudkan pemerataan pendapatan.

## Pihak yang Terkait dalam Merealisasikan Gagasan

### 1. Peran pemerintah

Pengembangan teori ekonomi pancasila merupakan dasar dari konsep pemerataan pendapatan yang ada di Indonesia. Hal ini diketahui oleh pemerintah tapi belum dapat dihayati secara menyeluruh. Padahal dasar tersebut diramu oleh para *founding fathers* negara ini dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur yang ada dalam negara ini. Menurut John Stuart Mill (1884) di bukunya *principles of political economy, with some of their applications to social philosophy* dalam mubyarto (1987) menyatakan bahwa produksi di kuasai oleh hukum-hukum alam yang tetap, tetapi tidak untuk distribusi, karena ia semata-mata bergantung pada human will, pada kemauan manusia.

Menurut John Stuart Mill (1984) bahwa tidak demikian halnya dalam persoalan pembagian kekayaan. Persoalannya semata-mata menyangkut kelembagaan manusia. Sekali lembaga itu sudah ada, manusia baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dapat berbuat apa saja sesuai

keinginannya. Maka oleh sebab itu pembagian kekayaan tergantung pada hukum dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Penemuan ini mempunyai konsekuensi yang dalam dan luar biasa. seluruh perdebatan ekonomi sejak saat itu lalu dipindahkan dari bidang hukum alam yang non personal dan tak terelakkan kembali ke ruang lingkup *etika* dan *moralitas*. Ekonomi pancasila dalam hal ini merupakan konsep ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.

Sementara itu, menurut Tibor Scitovsky melalui bukunya yang terkenal *Welfare and Competition* (1951), peran negara adalah mengobati kelemahan-kelemahan yang ada pada diri *competition* demi menjamin *welfare*. Negara, menurut Scitovsky, harus menyediakan jasa-jasa yang masyarakat secara kolektif dapat mengambil manfaat. Ia mendukung *antitrust legislation* dan menolak *aggressive competition* yang bertujuan menegakkan monopoli. Jadi, negara pada dasarnya berperan sebagai pendukung adanya kompetisi dalam usaha namun tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan jasa yang bermanfaat secara kolektif bagi masyarakat. Dan negara bisa mendukung pembentukan karakter masyarakat yang berlandaskan pada kemandirian dan sosial berlandaskan pancasila.

## **2. Peran Masyarakat**

Indikator tata nilai pancasila untuk diaplikasikan para wirausahawan dalam *sociopreneur* seyogyanya diinternalisasikan dengan baik oleh masyarakat dan dapat diterapkan secara optimal. Adapun peran masyarakat dalam perwujudan gagasan ini adalah dengan terlebih dahulu memahami konsep *sociopreneur* berbasis pancasila dan manfaatnya bagi kehidupan sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Setelah memahami, masyarakat terutama para pengangguran dapat mengimplementasikan pemahamannya terkait konsep *sociopreneur*. Sehingga diharapkan permasalahan sosial masyarakat seperti kesenjangan pemerataan di suatu daerah dapat diatasi.

### **Langkah Strategis yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Gagasan**

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan tersebut, antara lain:

**a) Menentukan Daerah Percontohan dari Konsep Sociopreneur**

Penentuan daerah percontohan menjadi awal dari langkah strategis karena membangun suatu masyarakat yang ideal dan sejahtera, harus terlebih dahulu membangun daerah percontohan agar daerah-daerah lainnya dapat menyesuaikan dan membentuk karakteristik yang sama dengan daerah percontohan tersebut.

**b) Membentuk Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada Daerah Percontohan**

Setelah melakukan penentuan daerah percontohan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif kepada pemerintah daerah, *opinion leader* dan masyarakatnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan target bersama yang akan dicapai yang sesuai konsep *sociopreneur* berbasis pancasila.

**c) Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat melalui *Opinion Leader***

Dalam langkah selanjutnya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui *opinion leader*. Untuk mencapai kemajuan secara kolektif, masyarakat yang kompleks maka dapat dimulai dengan kehadiran seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi untuk memotivasi masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan. Sehingga dengan adanya penyuluhan dari seorang *opinion leader* mengenai pentingnya kembali kepada nilai-nilai pancasila, kemandirian, dan rasa humanis yang tinggi, maka akan diharapkan tercipta gerakan kolektif yang membawa masyarakat ke arah kemajuan, pencapaian keadilan nasional sesuai sila kelima pancasila, dan pemerataan pendapatan.

**d) Memberikan Pendidikan Karakter Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila sejak Dini Kepada Masyarakat**

Jati diri atau karakter merupakan hal yang esensial dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan karakter sejak dini merupakan proses edukasi dalam upaya mempersiapkan dan mengembangkan sikap mental sejak awal dalam menghadapi problema kehidupan khususnya remaja. Di dalamnya, terkandung lima aspek kualitas non fisik yang diharapkan bisa terbentuk. Yaitu, kualitas kepribadian (meliputi kecerdasan, ketahanan mental dan kemandirian), kualitas bermasyarakat (meliputi kesetiakawanan sosial dan kemampuan bermasyarakat (Achir, 2002). Kelima aspek ini terkandung dalam nilai-nilai pancasila. Sehingga penerapan nilai-nilai pancasila yang ditanamkan sejak dini dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya.

**e) Membentuk Karakter Masyarakat yang sesuai Indikator Kewirausahaan Sosial Berbasis Pancasila**

Langkah berikutnya adalah pembentukan masyarakat sesuai indikator kewirausahaan sosial berbasis pancasila, adapun cara yang ditempuh adalah dengan memberikan suri teladan yang dilakukan *opinion leader* dan penyuluhan terkait kemandirian, rasa humanis, dan nilai-nilai luhur pancasila. Taktik dengan memberi contoh dan menginspirasi individu atau kelompok adalah hal yang tepat dalam mewujudkan Karakter Masyarakat sesuai indikator kewirausahaan sosial berbasis pancasila.

**f) Membentuk Proyek Bersama Elemen Masyarakat dalam Hal Penerapan *Sociopreneurship***

Pembentukan program bersama ini dilakukan guna menerapkan prinsip-prinsip yang telah diberikan kepada *opinion leader* dan masyarakat dari daerah percontohan. Adapun program penerapan *sociopreneur* dibuat berdasarkan ACM (*adaptive collaborative management*), sehingga proyek tersebut berbasis masyarakat dalam artian kegiatan usaha yang dilaksanakan merupakan program bersama elemen masyarakat dimana masyarakat menjadi aktor yang menjalani program *sociopreneurship* sekaligus pihak yang akan mendapatkan keuntungan

dari *sociopreneurship* tersebut, atau dalam istilah dikatakan “dari rakyat untuk rakyat”.

**g) Melakukan Evaluasi Berkesinambungan.**

Langkah terakhir adalah dengan melakukan evaluasi berkesinambungan terhadap langkah-langkah yang sudah dilalui oleh pemerintah daerah, penyuluh, *opinion leader*, dan masyarakat. Hal ini dilakukan guna memperbaiki langkah-langkah yang tidak sesuai dengan target yang disetujui bersama.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari gagasan ini, antara lain:

1. Kewirausahaan sosial berbasiskan pancasila ini adalah konsep kemandirian, kreatifitas, dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan yang berlandaskan atas nilai-nilai dasar perjuangan Indonesia, yaitu pancasila.
2. Dalam berwirausaha, seorang *sosiopreneur* harus efisiensi dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Namun, keadilan sosial baik secara intern maupun dengan masyarakat sekitar merupakan hal yang penting dan tidak boleh diremehkan.
3. Prinsip *sociopreneur* yang digagas merupakan variabel pendorong dalam hal menekan pengangguran dan pemecahan masalah pemerataan pendapatan yang ada di masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Kasmir,. *Kewirausahaan*. Penerbit Raja Grafindo Persada. 2006.

Pranardji, Tri. *Gagasan Pembangunan Berbasis Kualitas Penduduk dan Tata Nilai Sosio-Budaya*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. 2007.

Zimmerer, Thomas W. *Enterpreneurship and New Venture Formation*. Prenticehall International Inc. 1996.

<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=56355> diakses pada 27-02-2011 20:23

## LAMPIRAN

### **Nama dan Biodata Ketua Serta Anggota**

#### **1. Ketua Pelaksana**

Nama	: Stevi pebriani
Tempat, tanggal lahir	: Binjai, 16 februari 1990
Alamat di Bogor	: Jl. Raya Dramaga Wisma Wina Bogor
No. telp./HP	: 085717141161
E-mail	: stevi.pebriani@yahoo.com
Prestasi	: -
Pengalaman Karya Tulis	: -

#### **2. Anggota Pelaksana I**

Nama	: Alvino Maryandani
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 25 Maret 1990
Alamat di Bogor	: Jln Cihideug Hilir No.33 Dramaga Bogor
No. telp./HP	: 085717141161
E-mail	: vinomaryandani@yahoo.co.uk
Prestasi	: -
Pengalaman Karya Tulis	: -

**3 Anggota Pelaksana II**

Nama : Adinda virantika Putri  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 September 1991  
Alamat : Jln Cagar Alam Selatan 2 No. 31 Pancoranmas  
Depok  
No. telp./HP : 08561364424  
E-mail : dinda\_angkasa@yahoo.co.id  
Prestasi : -  
Pengalaman Karya Tulis : -